

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai isi skripsi yang berjudul “Politik Luar Negeri Arab Saudi di Bawah Pemerintahan Raja Abdullah terhadap Konflik Suriah Tahun 2011-2014”. Keseluruhan isi skripsi ini diuraikan kedalam beberapa bagian, meliputi latar belakang, pokok permasalahan, kerangka pemikiran/teori yang digunakan, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Arab Spring* merupakan sebuah fenomena yang telah menjadi perhatian masyarakat internasional yang bermula pada tahun 2010. *Arab Spring* diartikan sebagai kebangkitan dunia Arab yang ditandai dengan adanya gelombang revolusi melalui aksi demonstrasi oleh warga negara yang melanda negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Aksi protes ini dilakukan dalam upaya untuk menggulingkan rezim otoriter dan tidak demokratis yang sedang dijalankan oleh penguasanya. Istilah *Arab Spring* sendiri mulai dikenal pada saat terjadi aksi demonstrasi di Tunisia yang berhasil menurunkan Zine El Abidine Ben Ali dari kursi kepresidenannya.<sup>1</sup> keberhasilan rakyat Tunisia dalam menumbangkan kekuasaan

---

<sup>1</sup> Khairisa Ferida, Fenomena Global Arab Spring Pengaruhi Suriah,  
[Http://Www.Yiela.Com/View/2609404/Fenomena-Global-Arab-Spring-Pengaruhi-Suriah](http://www.Yiela.Com/View/2609404/Fenomena-Global-Arab-Spring-Pengaruhi-Suriah),

presidennya menyebabkan menjalarnya fenomena ini ke negara-negara arab lainya seperti Mesir, Aljazair, Bahrain, Yaman, Libya, dan negara lain di kawasan ini termasuk Suriah.<sup>2</sup>

Suriah adalah satu dari sekian negara yang tergoncang oleh gencarnya revolusi. Suriah merupakan negara yang terletak di sebelah timur Laut Tengah dan berbatasan dengan Turki di sebelah utara, Irak di timur, Yordania di selatan, Israel di barat daya dan Lebanon di sebelah barat. Suriah memiliki tanah yang subur yaitu sekitar 50%, akan tetapi hanya 30% yang diolah. Tanah yang subur ini merupakan sumber daya yang penting bagi Suriah selain minyak dan gas yang hanya dimiliki dalam jumlah sedikit. Kemajuan ekonomi di Suriah terletak pada suplai air yang dimiliki negara ini. Suplai air di Suriah diperoleh dari sungai Eufrat. Sumber daya alam minyak mulai ditemukan di Suriah dan mulai di eksploitasi pada tahun 1968. Minyak inilah yang kemudian menjadi pendorong perekonomian Suriah tahun 1970an sampai 1980an. Keuntungan minyak juga diperoleh dari negara-negara yang melewati pipa minyaknya melalui Suriah.<sup>3</sup>

Suriah adalah negara yang memiliki sejarah yang panjang dan dijuluki sebagai “*the cradle of civilization*” atau tempat lahirnya peradaban. Seorang sejarawan Perancis bernama Andre Parrot mengemukakan bahwa “*all cultured men belong to two nation, his own and Syria*”, artinya manusia yang berbudaya berasal dari dua bangsa, yaitu bangsanya sendiri dan Suriah. Menurut Parrot, semua budaya yang

---

Diakses Pada 27 Agustus 2014

<sup>2</sup> Apriadi Tamburaka, S. , (2011), *Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: NARASI

<sup>3</sup> Harwanto Dahlan, Diktat Kuliah: *Politik Dan Pemerintahan Timur Tengah*.

beradab dan perkembangan peradaban manusia pasti berasal dari Suriah. Suriah adalah tempat ditemukannya perak dan tembaga, hukum pertanian, aturan dagang, dan aturan hubungan internasional. Pada masa lalu, Suriah memiliki wilayah yang luas di sebelah timur Laut Mediterania. Suriah merupakan wilayah yang menghubungkan benua Eropa, Afrika, dan Asia dimana wilayah ini dijadikan sebagai jalur perdagangan, tempat pertukaran budaya, dan wilayah yang perebutkan berbagai dinasti dan imperium. Negara ini juga menjadi pusat kekhalifahan islam yang cakupan wilayahnya sangat luas yaitu dari Prancis, Spanyol, Asia Tengah, dan India.<sup>4</sup>

Revolusi yang terjadi di Suriah menyebabkan terjadinya pergolakan dalam negeri tersebut. Konflik di Suriah dimulai pada Maret 2011 yang diawali dengan demonstrasi damai. Dalam demonstrasi tersebut, rakyat Suriah hanya menuntut pemerintah agar melakukan perbaikan kesejahteraan dan hak-hak politik. Akan tetapi, konflik tersebut kemudian menjadi semakin keruh karena tuntutan rakyat untuk menurunkan Bashar al-Assad dari kekuasaannya. Demonstrasi itu kemudian berujung pada perang saudara yang berdampak pada banyaknya korban jiwa di Suriah.<sup>5</sup>

Setelah kemerdekaannya di peroleh dari Perancis pada tahun 1948, Suriah sering mengalami gejolak militer antara tahun 1949 sampai 1971. Kudeta militer yang terjadi di Suriah menyebabkan berakhirnya perserikatan Republik Persatuan Arab (RPA) setelah keanggotaannya pada tahun 1958-1961. Dari tahun 1963 hingga

---

<sup>4</sup> Dina Y. Sulaeman, (2013), *Prahara Suriah*. Bandung: Pustaka Iiman.

<sup>5</sup> Hiski Darmayana, *Konflik Suriah Dan Intervensi Imperialis Barat*.

<http://www.Berdikarionline.Com/Dunia-Bergerak/20130713/Konflik-Suriah-Dan-Intervensi-Imperialis-Barat.Html> diakses pada 27 Agustus 2014

2011, Suriah terus memberlakukan undang-undang darurat militer sehingga sistem pemerintahannya dianggap tidak demokratis. Presiden Bashar al Assad adalah presiden yang ditunjuk secara aklamasi yang mengambil tampuk pemerintahan dari ayahnya Hafez al Assad sejak tahun 2000.<sup>6</sup>

Perang saudara antara oposisi dan pemerintah tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga meluas dengan adanya keterlibatan negara lain. Negara-negara yang ikut terlibat dalam konflik ini diantaranya AS, Israel, Inggris, Prancis, Turki, Rusia, China, dan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, serta Iran. Dari sekian negara-negara yang ikut masuk dalam konflik di Suriah ini terbagi menjadi dua kubu utama. Yang pertama adalah kubu pendukung pemberontak atau oposisi seperti AS, Israel, Prancis, Turki, Qatar, Arab Saudi. Kedua adalah kubu pendukung pemerintah Bashar al-Assad yaitu Rusia, China dan Iran.

Arab Saudi merupakan negara yang selalu aktif dalam menghadapi kebangkitan rakyat yang telah terjadi di beberapa negara dikawasan Timur Tengah. Dengan semakin meluasnya aksi rakyat di beberapa negara di kawasan ini yang menuntut demokrasi dan pergantian pemerintah, Arab Saudi tidak tinggal diam. Arab Saudi aktif memainkan perannya dalam mengatasi kelompok-kelompok revolusioner ini. Negara *petrodollar* ini berupaya agar revolusi tidak masuk dan menyebar ke negaranya. Peran pertama yang dimainkan Arab Saudi adalah pada saat terjadi demonstrasi rakyat di Tunisia yang berusaha menumbangkan diktator Zine El

---

<sup>6</sup> Masykur A.Baddal, *Miris, Mengapa Arab Ramai-Ramai Memusuhi Suriah*, [Http://Luar-Negeri.Kompasiana.Com/2012/02/11/Miris-Mengapa-Arab-Ramai-Ramai-Memusuhi-Suriah-438416.Html](http://Luar-Negeri.Kompasiana.Com/2012/02/11/Miris-Mengapa-Arab-Ramai-Ramai-Memusuhi-Suriah-438416.Html) Diakses pada 22 September 2014

Abidine Ben Ali. Saat Ben Ali melarikan diri dari Tunisia, Arab Saudilah yang memberikan tempat bagi pelarian mantan diktator Tunisia itu.<sup>7</sup>

Pada saat terjadi kebangkitan rakyat di Mesir yang menuntut pengunduran diri Hosni Mubarak, Arab Saudi secara transparan memberikan dukungannya terhadap presiden ke-empat Mesir ini. Arab Saudi juga menentang sikap rakyat yang ingin menumbangkan rezim Mubarak. Saat revolusi sampai ke Bahrain, Arab Saudi melakukan intervensi dalam upaya menumpas aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat Bahrain terhadap pemerintahnya, Al Khalifa. Intervensi yang dilakukan Arab Saudi adalah dengan menempatkan pasukan militernya di Bahrain untuk menghadapi aksi rakyat yang menentang pemerintah.<sup>8</sup> Penguasa Arab Saudi juga aktif dalam menyikapi kebangkitan rakyat di Yaman. Secara langsung Arab Saudi ikut terlibat dalam seluruh krisis dan transformasi yang terjadi di Yaman. Dampak *Arab Spring* yang terjadi di Yaman menyebabkan rakyat Yaman melakukan demonstrasi menuntut presiden Ali Abdullah Saleh. Dukungan Arab Saudi kepada pemerintah Yaman dalam memerangi para pemberontak anti pemerintah dilakukan dengan jalan memberi bantuan baik bantuan logistik maupun militer.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Voice Of Palestine, *Kenapa Arab Saudi Anti Revolusi Timur Tengah*  
[Http://Voiceofpalestine.Net/Artikel/Opini/685-Kenapa-Arab-Saudi-Anti-Revolusi-Timur-Tengah.Html](http://Voiceofpalestine.Net/Artikel/Opini/685-Kenapa-Arab-Saudi-Anti-Revolusi-Timur-Tengah.Html)  
Diakses Pada 26 September 2014

<sup>8</sup> Daarut Tauhid  
[Https://Www.Mail-Archive.Com/Daarut-Tauhiid@Yahoogroups.Com/Msg11297.Html](https://Www.Mail-Archive.Com/Daarut-Tauhiid@Yahoogroups.Com/Msg11297.Html) Diakses Pada 27 Agustus 2014

<sup>9</sup> [Http://Direktori.Umy.Ac.Id/Uploads/Skripsi2/20060510081-Bab-I.Pdf](http://Direktori.Umy.Ac.Id/Uploads/Skripsi2/20060510081-Bab-I.Pdf) Diakses Pada Tanggal 30 September 2014

Pada saat terjadi pergolakan di Suriah antara pemerintah Suriah dengan kelompok oposisi yang menuntut demokrasi, Arab Saudi tidak menunjukkan sikap yang sama seperti yang telah dilakukan di negara-negara lainya. Selama ini Saudi selalu mendukung para diktator negara-negara Timur Tengah dalam menghadapi aksi protes yang dilakukan oleh rakyatnya. Akan tetapi Arab Saudi justru mendukung kelompok revolusioner dan menentang pemerintah Suriah, Bashar al Assad.

Arab Saudi merupakan salah satu dari sekian negara yang masuk kedalam blok melawan pemerintah Bashar al-Assad. Bahkan Arab Saudi secara transparan memberikan dukungannya kepada pihak oposisi. Dukungan tersebut dilakukan dengan memberi bantuan berupa persenjataan. Arab Saudi mengirimkan bantuan senjata dan alat-alat berat serta memberikan pelatihan militer kepada kelompok oposisi. Bukan hanya bantuan persenjataan yang diterima oleh pejuang oposisi Suriah, Arab Saudi juga memberikan bantuan dana berupa gaji dalam mata uang dollar atau euro.<sup>10</sup> Selain itu, Arab Saudi menjadi pelopor dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pejuang dan pengungsi Suriah. Pemerintah Arab Saudi juga mengajak negara-negara muslim lainya untuk mengadakan pertemuan di Mekah, dimana pertemuan tersebut ditujukan untuk memperkuat jaringan anti-Suriah. Peranan aktif Arab Saudi semakin aktif setelah konflik memanas dengan masuknya Hizbullah dan Garda Revolusi Iran di Suriah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> El Moussaoui , *Kepentingan Arab Saudi Dalam Konflik Suriah*,  
[Http://Www.Dw.De/kepentingan-Arab-Saudi-Dalam-Perang-Suriah/A-17385172](http://www.dw.de/kepentingan-arab-saudi-dalam-perang-suriah/a-17385172), Diakses Pada 27 Agustus 2014

<sup>11</sup> Denny Armandhanu, *Saudi Kirim Rudal Anti Jet Untuk Pejuang Suriah*

Pada tahun 2011, Arab Saudi menandatangani kesepakatan dengan PBB terkait pembentukan pusat anti teror. Negara kaya minyak ini juga memberikan sumbangan untuk mendukung pembangunan badan untuk memerangi aksi terorisme ini. Namun berkaitan dengan konflik di Suriah, Arab Saudi justru memberikan bantuan baik finansial maupun persenjataan untuk membantu menumbangkan pemerintahan Bashar al-Assad dimana bantuan tersebut jatuh di tangan pemberontak yang juga melakukan aksi terorisme. Sebagai dampaknya, banyak korban dari rakyat sipil yang berjatuh akibat ledakan bom dan pembantaian massal. Karena aksi ini bukan dilakukan oleh polisi atau militer, maka hal ini bisa dikatakan sebagai aksi terorisme dan bukan aksi militer.

Seperti halnya Suriah, dimana sistem politik yang dijalankan pemerintahnya bersifat totaliter, dibawah kekuasaan monarki absolut, Arab Saudi juga merupakan negara yang menjalankan sistem totaliter. Sistem ini menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh (total) atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, Suriah yang saat ini dipimpin oleh Bashar al Assad selalu berada dibawah kekuasaan keluarga Assad dan telah berkuasa selama kurang lebih empatpuluh tahun. Sedangkan Arab Saudi adalah negara dengan bentuk monarkhi absolut dimana kekuasaan kepala negara atau pemerintahan berada ditangan raja praktis dan tidak terbatas yang masih dipegang

---

[Http://Dunia.News.Viva.Co.Id/News/Read/421695-Saudi-Kirim-Rudal-Anti-Jet-Untuk-Pejuang-Suriah](http://Dunia.News.Viva.Co.Id/News/Read/421695-Saudi-Kirim-Rudal-Anti-Jet-Untuk-Pejuang-Suriah), Diakses Pada 27 Agustus 2014

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti, (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo. Hal. 225

kuat oleh dinasti Saud saat ini. Kedua negara ini juga bukan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Menurut Robert Dahl, Arab Saudi bertindak membatasi berlakunya nilai-nilai liberal dan demokratis serta partisipasi politik warga negaranya.<sup>13</sup> Di Arab Saudi, partai-partai politik juga dilarang dan tidak adanya parlemen karena yang ada hanya permusyawaratan untuk memberikan nasehat dan sebagai pendamping raja dan keluarganya. Tidak hanya itu, pemimpin Arab Saudi memberikan hukuman bagi pihak yang menginginkan demokrasi.<sup>14</sup> Berbagai kasus pelanggaran HAM juga telah terjadi di negara tersebut. Arab Saudi telah melakukan penangkapan sewenang-wenang, penahanan, pengadilan yang tidak adil, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya selama empat tahun sejak 2009.<sup>15</sup>

Dari segi persamaan problem dan faktor pendorong revolusi seperti masalah penguasa dan demokrasi seperti yang telah terjadi di Tunisia, Yaman, Mesir, serta Libya, Arab Saudi termasuk negara yang mempunyai peluang untuk terjadinya sebuah revolusi. Apalagi kebangkitan islam yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah menyebar dan menyeruak ke berbagai negara termasuk Suriah yang saat ini masih bergejolak.<sup>16</sup> Dalam konflik di Suriah, Arab Saudi bukan bertidak menentang kelompok revolusioner seperti yang telah dilakukannya di Tunisia, Mesir, Bahrain, dan

---

<sup>13</sup> Sidik Jatmika, (2000), *AS, Penghambat Demokrasi*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing. Hal. 69

<sup>14</sup> Mulham Almalaika, *Arab Saudi Antara Modern Dan Dogmatis*,  
[Http://Www.Dw.De/Arab-Saudi-Antara-Modern-Dan-Dogmatis/A-17306272](http://www.dw.de/Arab-Saudi-Antara-Modern-Dan-Dogmatis/A-17306272), diakses pada 27 Agustus 2014

<sup>15</sup> Harian Kompas, *Catatan Kondisi HAM Di Arab Saudi Kian Meningkat*,  
[Http://Internasional.Kompas.Com/Read/2013/10/21/1458054/Catatan.Kondisi.HAM.Di.Arab.Saudi.Kian.Memburuk](http://Internasional.Kompas.Com/Read/2013/10/21/1458054/Catatan.Kondisi.HAM.Di.Arab.Saudi.Kian.Memburuk), Diakses Pada 27 Agustus 2014

<sup>16</sup> [Http://Www.Shabestan.Net/Id/Pages/?Cid=8680ssss](http://www.shabestan.net/id/pages/?cid=8680ssss) Diakses Pada 19 September 2014

Yaman. Akan tetapi Arab Saudi justru memberikan dukungan terhadap kelompok oposisi dalam upaya untuk menumbangkan penguasa di Suriah.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menemukan sebuah pokok permasalahan yaitu:

“mengapa Arab Saudi mendukung kelompok oposisi Suriah dalam upaya menggulingkan rezim Bashar al Assad?”

## **C. Kerangka Pemikiran/Teori Yang Digunakan**

Teori Decision Making Process

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri dilaksanakan oleh sebuah negara sebagai sebuah inisiatif atau sebuah reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan negara lain.<sup>17</sup> Politik Luar negeri dibuat dalam rangka untuk

---

<sup>17</sup> Jack C. Plano Dan Roy Olton, (1999), *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, Hal. 5

mencapai tujuan nasional yang merupakan formulasi kongkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung dan juga kekuatan yang dimiliki.<sup>18</sup>

William D. Coplin mengemukakan bahwa tindakan politik luar negeri bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Konsiderasi yang pertama adalah kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; ketiga adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dengan hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu.<sup>19</sup>

Dibawah ini adalah gambar yang mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengambil keputusan politik luar negeri saling berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri.

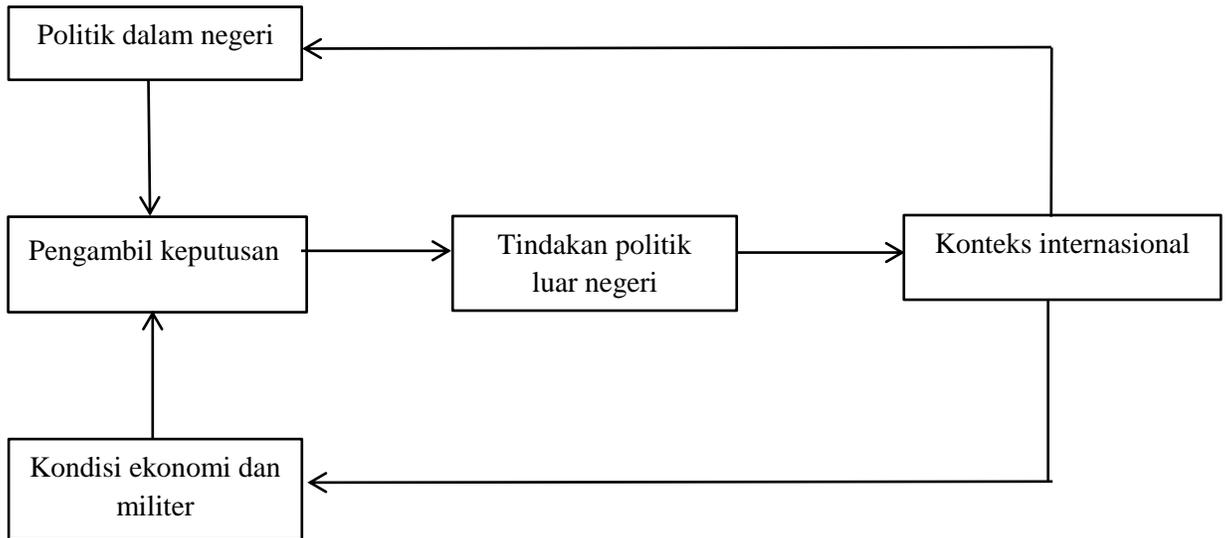
---

<sup>18</sup> Ibid, Hal. 6

<sup>19</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaan Teoritis*, Bandung: CV Sinar Baru, hal . 30

## Bagan 1

Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri<sup>20</sup>



Sumber: William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional, Suatu telaah teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992

### 1. Kondisi politik dalam negeri

Pengambilan keputusan politik luar negeri merupakan hasil interaksi antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Dalam hal ini, William D. Coplin menyebut aktor-aktor politik

---

<sup>20</sup> William D. Coplin, (1992), Pengantar Politik Internasional, Suatu telaah teoritis, Bandung: CV. Sinar Baru, Hal. 30

tersebut dengan “*policy influencers*” (yang mempengaruhi kebijakan), sedangkan hubungan antara antara aktor-aktor politik tadi dengan para pengambil keputusan politik luar negeri disebut dengan “*policy influence system*” (sistem pengaruh kebijakan).<sup>21</sup> Sistem pengaruh kebijakan setiap negara merupakan serangkaian hubungan timbal balik yang sangat kompleks antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*-nya.

Terdapat empat tipe *policy influencer*, diantaranya *bureaucratic influencer* (birokrat yang mempengaruhi). Tipe *influencer* ini menunjuk kepada berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan. Tipe *policy influencer* kedua adalah *partisan influencer* (partai yang mempengaruhi). *Partisan influencer* bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan pemerintah. Tipe yang ketiga adalah *interest influencer* (kepentingan yang mempengaruhi). Tipe ini terdiri dari sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama yang belum cukup luas untuk dijadikan dasar bagi aktifitas partai, namun sangat dibutuhkan sebagai sumber dukungan dari *policy influencer* yang lain. Tipe *influencer* yang terakhir adalah *mass influencer* (masa yang mempengaruhi). Tipe *influencer* ini mengacu pada iklim opini, yang dimiliki oleh populasi

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 74

yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa kelompok kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Arab Saudi diantaranya keluarga kerajaan, para teknokrat, golongan berpendidikan, militer, dan ulama. Pendapat, klaim, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok kepentingan ini mempengaruhi pembuatan kebijakan di Arab Saudi.<sup>23</sup> Kelompok kepentingan yang berasal dari elit-elit agama menjadi kelompok kepentingan yang paling berpengaruh kedua setelah keluarga kerajaan. Hal ini dikarenakan negara Arab Saudi yang berbasis islam. Sebagai pemimpin terkemuka dalam kelompok ini, ulama berperan dalam membentuk nilai-nilai sosial dan praktik-praktik kenegaraan sehingga ulama berperan langsung dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri melalui institusi-institusi pemerintahan.<sup>24</sup>

Menyikapi revolusi di dunia Arab, para ulama dan mufti Arab Saudi secara umum menentang setiap tindakan yang membangkang pemerintah baik yang terjadi di Tunisia, Mesir, Bahrain, Yaman kecuali di Libya dan Suriah. Dalam krisis yang terjadi di Suriah, para ulama Saudi mengeluarkan fatwa wajib hukumnya untuk memberikan dukungan baik bantuan materi maupun militer kepada oposisi suriah dalam perjuangan mereka melawan Bashar Al

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 104

<sup>23</sup> Abdulrhman A. Hussein, (2012). *So History Doesn't Forget: Alliances Behavior in Foreign Policy of the Kingdom of Saudi Arabia 1979-1990*, Bloomington: Authorhouse, hal. 54

<sup>24</sup> Ibid, hal. 57

Assad. Fatwa-fatwa tersebut disebarakan ke masjid-masjid Saudi dan para khatib jumat menyerukan kepada warga untuk memberikan dukungan kepada pejuang Suriah.<sup>25</sup>

## 2. Faktor ekonomi dan militer

Dalam perumusan politik luar negeri, para pengambil keputusan juga harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan-kelemahan negaranya. Dia harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya yang diakibatkan karena kondisi ekonomi dan militer. Terdapat dua dimensi ekonomi yang relevan dengan penyusunan politik luar negeri yaitu kapasitas produksi ekonomi dan kebergantungann ekonomi pada perdagangan dan finansial internasional. Kekuatan militer tidak hanya berkaitan dengan jumlah tentara, kualitas perlengkapan, dan tingkat keterlatihan. Akan tetapi juga bergantung pada tingkat dukungan luar negeri serta peran angkatan bersenjata dalam memelihara stabilitas dalam negeri.<sup>26</sup>

Ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat maka akan meningkatkan kemakmuran ekonomi, sebaliknya ketika kemampuan ekonomi

---

<sup>25</sup> Hasbi Aswar, (2013) Peran Ulama Dalam Kebijakan Pemerintah Saudi Studi Kasus: Kontraterorisme Dan Fenomena Arab Spring, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, hal. 5

<sup>26</sup> William D. Coplin. *op. cit.*, Hal. 341

semakin kuat maka akan berpengaruh pada peningkatan kekuatan militernya. Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, negara akan lebih aktif dalam memainkan perannya dalam percaturan politik internasional. Sehingga kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi posisi tawar dimata negara lain dan akhirnya akan menentukan sikap negara terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kedua unsur tersebut mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain yang sangat dibutuhkan negara dalam rangka menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Kondisi perekonomian dan militer yang semakin baik menjadikan suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.<sup>27</sup>

Dilihat dari aspek ekonomi, Arab Saudi adalah negara yang mempunyai kekayaan minyak yang tidak diragukan lagi yang menguasai ¼ dari cadangan minyak dunia dan juga sebagai produsen dan pengeksport minyak terbesar di dunia. Negara ini mempunyai 265,9 miliar barel cadangan minyak serta 290,8 triliun kaki kubik gas. Kedua cadangan energi itu jika dikonversi dengan harga pada saat ini bernilai US\$ 33 triliun.<sup>28</sup> Arab Saudi memproduksi minyak bumi sekitar 11,6 juta barel per hari pada tahun 2013 yang mana 9,6 juta barel adalah produksi minyak mentah dan 2 juta barel

---

<sup>27</sup> Budi Winarno, (2011), *Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Buku Seru

<sup>28</sup> Ini Negara Dengan Cadangan Energi Terbesar Di Dunia, [Http://Bisnis.News.Viva.Co.Id/News/Read/482403-Ini-Negara-Dengan-Cadangan-Energi-Terbesar-Di-Dunia](http://Bisnis.News.Viva.Co.Id/News/Read/482403-Ini-Negara-Dengan-Cadangan-Energi-Terbesar-Di-Dunia), Diakses Pada 21 Januari 2015

produksi non-mentah.<sup>29</sup> Sektor minyak bumi menyumbang sekitar 80% dari pendapatan anggaran, 45% dari PDB, dan 90% dari pendapatan ekspor.<sup>30</sup>

Suriah mempunyai peranan penting dalam ekonomi global. Hal ini karena posisi strategis Suriah yang menghubungkan antara tiga benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Suriah juga mempunyai akses langsung ke laut tengah dan posisinya yang berada di simpul jalur sutra yang dilewati pipa-pipa minyak dan gas oleh negara-negara lintas benua.<sup>31</sup> Pengiriman minyak akan lebih efisien dengan jalur pipa yang melewati Suriah karena biaya pengiriman lebih rendah, lebih cepat dan aman. Biaya pengiriman minyak dengan kapal dan jalur kereta berkisar antara \$10 sampai \$15 per barel. Sedangkan pengiriman minyak mentah menggunakan jalur pipa hanya sekitar \$5 per barel.<sup>32</sup>

### 3. Konteks internasional

Secara tradisional, para analis telah menekankan bahwa sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu, menentukan bagaimana negara akan berperilaku. Tokoh pemikir realis, Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa setiap negara memiliki

---

<sup>29</sup> U.S energy Information administration, <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=sa>, diakses pada 8 Mei 2015

<sup>30</sup> <http://www.kemlu.go.id/riyadh/Pages/CountryProfile.aspx?l=id>, diakses pada 8 Mei 2015

<sup>31</sup> Dina Y. Sulaeman, (2013), *Prahara Suriah, Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Bandung:Pustaka Iman, hal. 13

<sup>32</sup> About Pipelines <http://www.aopl.org/pipeline-basics/about-pipelines/>, diakses pada 8 Mei 2015

hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Kepentingan nasional ini dianggap penting dalam menentukan politik luar negeri suatu negara.<sup>33</sup>

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Dalam hal ini, lingkungan internasional setiap negara berdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitanya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara lain. Aliansi–aliansi juga bisa berdampak besar terhadap anggotanya dan bukan anggotanya. Terutama apabila aliansi itu menyangkut pasukan-pasukan yang berada di wilayah asing.<sup>34</sup>

Peran Arab Saudi semakin aktif di Suriah setelah masuknya pasukan Garda Iran di Suriah. Iran merupakan negara yang berada di pihak pemerintah Suriah, Bashar Al Assad. Secara terbuka, Iran memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Bashar al Assad dalam menghadapi kelompok pemberontak Suriah. Aliansi antara Suriah dengan Iran memang telah terjalin sejak berdirinya Republik Islam Iran. Hal ini terjalin dengan adanya kedekatan ideologis antar kedua negara.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> William D. Coplin. *op. cit.*, Hal. 166

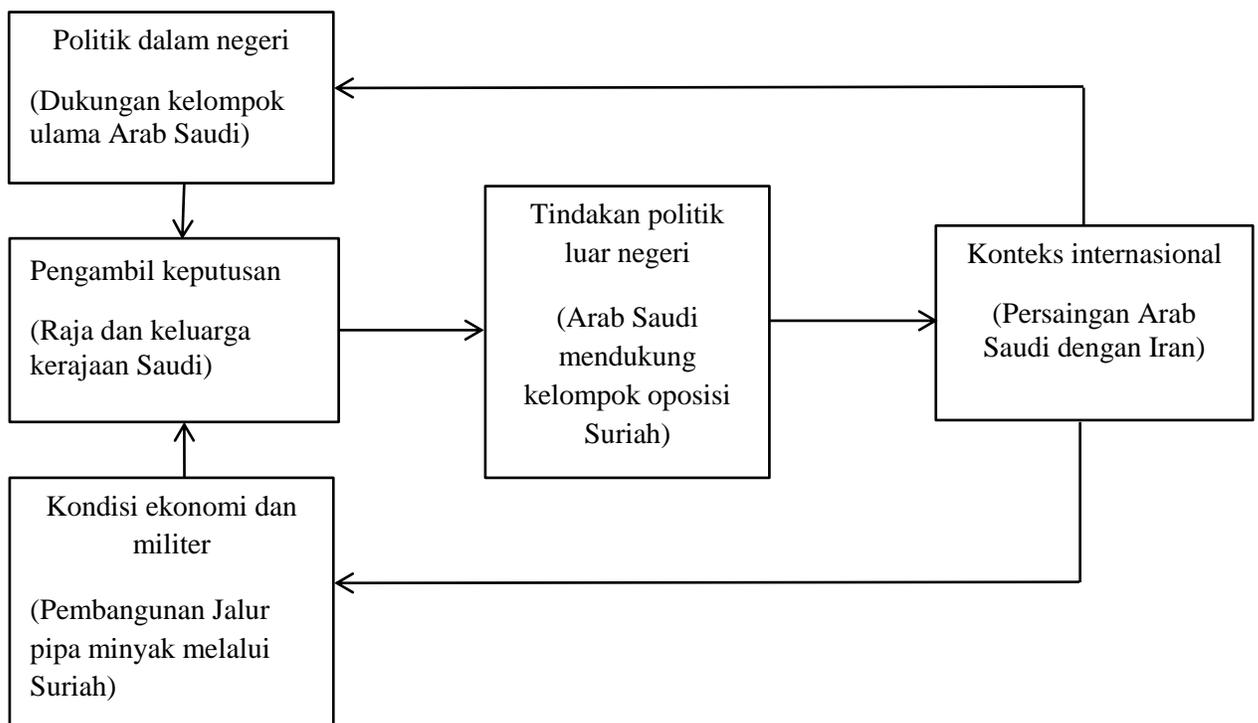
<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 167

<sup>35</sup> Saudi Kirim Rudal Anti-jet untuk Pejuang Suriah, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/421695-saudi-kirim-rudal-anti-jet-untuk-pejuang-suriah>, diakses pada 21 Januari 2015

Hubungan Arab Saudi dengan Iran memburuk sejak republik Islam Iran berdiri dan dengan program revolusi yang di serukan oleh Iran mengenai ekspor revolusi. Ditambah lagi dengan persaingan antar dua sekte keagamaan dalam islam yang telah terbetuk sejak dulu antar sunni dan Syiah. Iran telah lama menjadi salah satu saingan regional kerajaan Saudi khususnya di kawasan Timur Tengah.<sup>36</sup>

## Bagan 2

### Operasionalisasi Empat Determinan yang Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri Arab Saudi di Suriah



<sup>36</sup> Sidik Jatmika, (2000) , AS Penghambat Demokrasi, Membongkar standar Ganda Amerika Serikat, Yogyakarta: Bigraf, hal. 112

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis menarik hipotesa bahwa alasan Arab Saudi mendukung kelompok oposisi dalam upaya menggulingkan Bashar al Assad di Suriah di pengaruhi oleh tiga faktor:

1. Kondisi politik domestik dengan adanya dukungan dari ulama Saudi untuk mendukung kelompok oposisi Suriah
2. Kondisi ekonomi terkait pembangunan jalur pipa minyak Arab Saudi melalui Suriah, kondisi militer tidak berpengaruh dalam pembuatan kebijakan Arab Saudi terhadap Suriah
3. Konteks internasional yang muncul dengan adanya persaingan dengan Iran sebagai saingan regional Arab Saudi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Penulisan ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Arab Saudi mendukung kelompok oposisi Suriah,
2. untuk mengetahui pengaruh kondisi politik dalam negeri Arab Saudi dalam pengambilan keputusan politik luar negerinya di Suriah,
3. untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Saudi di Suriah,

4. untuk mengetahui pengaruh konteks internasional terhadap kebijakan Arab Saudi di Suriah.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan study kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang diperoleh dari berbagai sumber baik media cetak maupun media *on-line* berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah penelitian. Dengan memberikan batasan penelitian, dimaksudkan agar penulisan tidak melebar pada aspek waktu maupun kedalam permasalahan yang lain. Sehingga akan lebih fokus kepada bahasan yang dikaji. Dalam penelitian ini, dibatasi sampai pada pemerintahan raja Abdullah di Arab Saudi dan terhadap konflik Suriah yang dimulai sejak tahun 2011 sampai 2014.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab termuat beberapa bagian sebagai berikut:

**Bab pertama** dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian pendahuluan. Sub-bab pertama dalam bab ini adalah latar belakang masalah yang berkenaan dengan fenomena dan masalah yang probematis dimana masalah itu terjadi saat harapan ideal tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Disini Penulis menjelaskan tentang fakta-fakta yang menjelaskan standar ganda yang dilakukan Arab Saudi dalam menyikapi fenomena *Arab Spring* di negara-negara di Timur Tengah. Sub-bab kedua dalam bab ini adalah pokok permasalahan yang berisi pertanyaan tentang inti masalah yang diteliti. Di bagian ini, penulis merumuskan permasalahan dengan terlebih dahulu menampilkan sebuah kontradiksi dalam latar belakang sehingga muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan penulis adalah “mengapa Arab Saudi mendukung kelompok oposisi Suriah dalam upaya menggulingkan Basahra al Assad. Sub-bab yang ke-tiga dalam bab ini adalah kerangka pemikiran atau teori. Teori merupakan pisau analisa untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi. Untuk menjawab pertanyaan dalam pokok permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori *decision making process* oleh William D. Coplin yang mengemukakan beberapa determinan yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri. Sub-bab ke-empat dalam bab ini adalah hipotesa yang berisi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diangkat oleh penulis

dengan mengkaitkan dengan teori yang digunakan penulis. Sub-bab ke-lima dalam bab ini adalah tujuan penelitian. Dalam sub-bab ini penulis menguraikan tujuan penelitian yang pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Bagian ke-enam dalam bab ini adalah metode penelitian yang meliputi teknik pengumpulan data, metode penelitian, serta prosedur analisis yang digunakan penulis. Sub-bab selanjutnya dalam bab pendahuluan ini adalah jangkauan penelitian yang digunakan untuk membatasi agar penelitian tidak terlalu luas. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan. Dalam bagian ini penulis memberikan potret tampilan (*overview*) skripsi secara keseluruhan.

**Bab ke-dua** dalam penulisan skripsi ini berjudul Politik Luar Negeri Arab Saudi dan hubungannya dengan Suriah. Pada bagian pertama, penulis terlebih dahulu sistem pemerintahan Arab Saudi yang menerapkan sistem pemerintahan berbentuk monarki. Dalam Sub-bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai politik luar negeri Arab Saudi. Di bagian terakhir dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hubungan Arab Saudi dengan Suriah dimana hubungan tersebut mengalami naik turun di masa sebelum dan sesudah konflik Suriah

**Bab ke-tiga** dalam penulisan skripsi ini berjudul dinmika konflik Suriah. Pada bagian yang pertama, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang pemerintahan Suriah pada masa ayah Bashar Al Assad yaitu Hafez al Assad dan pada pemerintahan Bashar Al Assad. Sub-bab kedua berisi uraian tentang konflik Suriah yang dimulai dengan menjelaskan kondisi di Suriah menjelang konflik, faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Suriah,

dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi di Suriah, keterlibatan negara lain dalam konflik di Suriah yang akan menjelaskan beberapa negara yang terlibat dalam konflik tersebut.

**Bab ke-empat** dalam penulisan skripsi ini adalah pembuktian hipotesa. Berdasarkan teori yang digunakan penulis, yaitu teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin, penulis akan membuktikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi politik luar negeri Arab Saudi dalam konflik Suriah. Disini penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengaruh kondisi politik domestik Arab Saudi dengan adanya dukungan dari kelompok Ulama untuk mendukung kelompok oposisi Suriah. Kemudian disusul dengan faktor ekonomi terkait dengan kepentingan pembangunan jalur pipa minyak melalui di Suriah. Yang terakhir penulis akan menguraikan konteks Internasional dengan mengkaitkan adanya persaingan Arab Saudi dengan Iran.

**Bab terakhir** dalam penulisan skripsi ini adalah kesimpulan yang berisi temuan dari penelitian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis terlebih dulu memberikan sedikit ringkasan dari bab-bab sebelumnya dan kemudian kesimpulan dari keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengambil kebijakan dalam pembuatan kebijakan luar negeri.